

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul K. Azhari dan Abdul Haris Surya Negoro. 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Aries Djaenuri dan Enceng. 2019. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Azyumardi Azra. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Universitas Pamulang Press.
- Bagir Manan. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.
- Bintar R. Saragih. 1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- C.S.T. Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Edi Priyono dan Fareshti Nurdiana Dihan. "E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas" Seminar Nasional Informatika. UPN "Veteran" Yogyakarta. 22 Mei 2010.
- Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- International IDEA. 2011. *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*, Australia: Program Asia dan Pasifik International IDEA.
- Inu K. Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jazim Hamidi. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah (Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Joko J. Prihatmoko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu; dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Josep A. Scumpeter. 2011. *Capitalis, Socialism & Democracy*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Laode Ida. 2006. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah*. Jakarta: Kerjasama ADEKSI dengan Konrad-Adenaeuer-Stiftung.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi: Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad Habibi dan Achmad Nurmandi. “*Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara*”. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan, Kewenangan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter M. Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Pieters W. 2006. *Internet Voting: Sebuah Tantangan Konseptual untuk Demokrasi: Inklusi Sosial: Implikasi Sosial dan Organisasi Untuk Sistem Informasi*. Boston: Pegas.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. D. H. Koesomahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rusli M. Karim. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sarundajang. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problematika dan Prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Suharizal dan Muslim chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sri Hartini, *et.al.* 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri S. Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaukani HR, *et.al.* 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, T. Titik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- B. Jurnal**
- Andi Pitono. “*Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.3/No.1/2012.
- Heru Nugroho. “*Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*”. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1/No.1/2012.
- HM. Thalhah. “*Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*”. *Jurnal Hukum*. Vol.16/No.8/2009.
- Loura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata. “*E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong E-Demokrasi)*”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.8/No.4/2011.
- M. Lutfi Chakim. “*Perubahan Sistem Kepala Daerah dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi (Changes of Local Government Election System in Dynamics of Democracy Implementation)*”. *Jurnal RechtsVinding*. Vol.3/No.1/2014.
- Ryan AfifDwinanda, *et.al.* “*Analisis Keragaman Model Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia,*” *Diponegoro Law Journal*. Vol.6/No.2/2017.

- Saddam Bancin. *et.al.* “*Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia menurut Asas Otonomi Daerah*”. *USU Law Journal*. Vol.5/No.2/2017.
- Sun Fatayati. “*Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*”. Vol.28/No.1/2017.
- Syafri Hariansah dan Anna Erliyana. “*Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil dan Prancis,*” *Pakuan Law Review*. Vol.4/No.2/2018.
- Vicko Taniady, *et.al.* “*Sistem E-Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia, dan Brazil*”. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol.19/No.2/2020.
- Yusdianto. “*Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.2/No.2/2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).